



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SURABAYA
UNIT KERJA : DINAS SOSIAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ANNA FAJRIATIN
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 434236

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	3.123.523.900
1. Tanah dan Bangunan Seluas 205 m2/206 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , LAINNYA Rp. 846.423.900		
2. Tanah Seluas 2007 m2 di KAB / KOTA KEDIRI, HASIL SENDIRI Rp. 35.100.000		
3. Tanah Seluas 2804 m2 di KAB / KOTA NGANJUK, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 92.000.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/135 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 1.350.000.000		
5. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	1.197.200.000
1. MOTOR, VESPA SPRINT I-GET 150 / SCOOTER Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 57.000.000		
2. MOBIL, TOYOTA FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 AT Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 560.200.000		
3. MOBIL, HONDA CR-V 1.5 TC PRESTIGE CVT JEEP 4X2 Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 580.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	660.359.500
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	689.235.410



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	5.670.318.810
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	5.670.318.810

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.